



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MANADO
DENGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MANADO
TENTANG
PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TAHANAN DAN NARAPIDANA
SERTA PELAYANAN PEREKAMAN BIOMETRIK DAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN LAINNYA

Nomor : 05/D.06/PKS/Capil-Lapas/II/2023

Nomor : W.25.PAS.PAS.1-PK.03.02 -191

Pada hari ini SELASA tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **JULISES DEFFIE OEHLERS, S.H.** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.
Berkedudukan Jln. Balai Kota No. 1 Tikala Kec. Tikala Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut. Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MARULYE TUA SYAM TENDELYE SIMBOLON, S.H. M.H.** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado.
Berkedudukan di Jl. Moh. Husni Thamrin No. 52, Kel. Tuminting, Kec. Tuminting

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Kota Manado, Sulawesi utara dalam hal ini menjalani jabatan sebagaimana tersebut diatas. Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara Bersama - sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Kota Manado;
- b) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Pelaksana Teknis tempat perawatan dan pembinaan Tahanan dan Narapidana;
- c) Bahwa pelayanan perekaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya dalam hal ini hanya berlaku bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di dalam naungan PIHAK KEDUA dan berdomisili di Kota Manado;
- d) Bahwa pelayanan perekaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya dilaksanakan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA secara manual ataupun online kepada PIHAK KESATU.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama perihal pendataan dan pemutakhiran data Tahanan dan Narapidana pelayanan perekaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
2. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana;
3. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan;
4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat menjadi NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

6. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka melakukan pendataan & pemutakhiran data Tahanan dan Narapidana serta pelayanan perekaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Pendataan dan pelaporan data dan dokumen Tahanan dan Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado.
2. Dukungan pelayanan administrasi kependudukan bagi Tahanan dan Narapidana seperti pelayanan jemput bola.
3. Pelaporan perubahan/pemutakhiran elemen data Tahanan dan Narapidana.

Pasal 4

Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Memberikan layanan konsultasi atas permasalahan yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan Tahanan dan Narapidana di dalam naungan PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan perubahan/pemutakhiran elemen data pada database kependudukan atas permohonan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- c. Memberikan pelayanan jemput bola perekaman biometrik nomor induk kependudukan (NIK) elektronik kepada Tahanan dan Narapidana di bawah naungan PIHAK KEDUA berdasarkan permohonan dari PIHAK KEDUA terlebih dahulu.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
- Melakukan pendataan dan melaporkan hasil pendataan kepemilikan NIK bagi Tahanan dan Narapidana di bawah naungan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
 - Melaporkan setiap perubahan elemen data kependudukan Tahanan dan Narapidana di bawah naungan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk dilakukan pembaharuan elemen datanya;
 - Melaporkan setiap mobilitas Tahanan dan Narapidana di bawah naungan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
 - Melaporkan Tahanan dan Narapidana yang telah dinyatakan bebas kepada PIHAK KESATU, untuk diterbitkan surat keterangan pindah sesuai dengan daerah tujuan, dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM RI;
 - Memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekaman nomor induk kependudukan untuk Tahanan dan Narapidana dalam naungan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Hak Para Pihak

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:
- mendapatkan data dan laporan dari PIHAK KEDUA terkait kepemilikan NIK bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di bawah naungan PIHAK KEDUA;
 - mendapatkan laporan setiap perubahan elemen data kependudukan Tahanan dan Narapidana di bawah naungan PIHAK KEDUA untuk dilakukan pembaharuan elemen datanya;
 - mendapatkan laporan setiap mobilitas Tahanan dan Narapidana di bawah naungan PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- d. mendapatkan laporan Tahanan dan Narapidana yang telah dinyatakan bebas dari PIHAK KEDUA, untuk diterbitkan surat keterangan pindah sesuai dengan daerah tujuan, dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- e. mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekaman nomor induk kependudukan untuk Tahanan dan Narapidana dalam naungan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan pelayanan dari PIHAK KESATU untuk perubahan elemen data bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di bawah naungan PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan layanan konsultasi dari PIHAK KESATU atas permasalahan data kependudukan Tahanan dan Narapidana yang berada dibawah naungan PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan pelayanan jemput bola perekaman biometrik nomor induk kependudukan (NIK) elektronik dari PIHAK KESATU terhadap Tahanan dan Narapidana di bawah naungan PIHAK KEDUA melalui permohonan dari PIHAK KEDUA terlebih dahulu.

Pasal 6

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK dan data kependudukan kepada PIHAK KESATU atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi per semester mengenai pemanfaatan NIK dan data kependudukan secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 8

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing pihak dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pemberitahuan dan Korespondensi

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (email) lpos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing Pihak berikut ini:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.
PIC : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Manado Jln. Balai Kota No. 1 Tikala Kec. Tikala Kota
Manado, Sulawesi Utara
Telepon :
Email :

PIHAK KEDUA : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado.
PIC : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado Jl. Moh.
Husni Thamrin No. 52, Kel. Tuminting, Kec.
Tuminting Kota Manado, Sulawesi utara
Telepon :
Email :

Pasal 10

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 11

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU



JULISES DEFFIE OEHLERS, S.H.
NIP. 196712231993031010

PIHAK KEDUA

MARULYE T. S. T SIMBOLON, S.H. M.H.
NIP. 197105281991031002